



ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014-2018

Asnanur Faizah

Email: 5230016009@student.unusa.ac.id

Mohammad Ghofirin

Email: MohammadGhofirin.@unusa.ac.id

ABSTRACT

The study aims to analyze the performance of the realization of the regional income and expenditure budget of Sumenep Regency in 2014-2018.

The data used in this study is secondary data, taken from the 2014 to 2018 annual financial reports from the Sumenep Regency APBD. The method used in this research is a qualitative descriptive analysis based on the Budget Realization Report (LRA), namely with the concept of a budget, especially expenditure analysis.

The results of this study, namely spending on LRA for 2014-2018 show that the performance of Sumenep Regency Government spending is considered good and continues to make improvements every year in the utilization of spending realization. Expenditure growth began to appear in 2016 compared to 2014-2015. So that it is hoped that in the following year the Sumenep Regency Government should allocate a balanced portion of the region according to the needs of regional development and the welfare of the community. Allocation of regional expenditure so as to increase the effectiveness, productivity and efficiency of spending in the future.

Keywords: performance analysis, expenditure, budget realization report



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sumenep tahun 2014-2018.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dari laporan keuangan tahunan 2014 sampai dengan 2018 dari APBD Kabupaten sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni dengan konsep anggaran khususnya analisis belanja.

Hasil penelitian ini yaitu belanja pada LRA untuk Tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Sumenep dinilai baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi belanja. Pertumbuhan belanja mulai terlihat pada tahun 2016 dibandingkan dengan Tahun 2014-2015. Sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sumenep sebaiknya mengalokasikan belanja daerah dalam porsi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian belanja daerah sehingga dapat meningkatkan efektivitas, Produktivitas dan efisiensi belanja di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Analisis Kinerja, Belanja, Laporan Realisasi Anggaran

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah suatu badan persekutuan yang memiliki kebijakan tersendiri, untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan di suatu negara Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan kesehatan maupun keimanan.

Dilihat dari jumlah APBD Kabupaten Sumenep setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah untuk menentukan bidang anggaran belanja agar stabilitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tetap dipertahankan, artinya besarnya pengeluaran total tidak boleh melebihi besarnya pendapatan total (surplus). Dan APBD harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan efisien serta responsif terhadap kebutuhan dan potensi wilayah Kabupaten Sumenep. Harapan besar tersebut bisa dilaksanakan, jika perencanaan anggaran belanja setiap kegiatan pada APBD efektif, tepat sasaran, wajar, tidak underfinancing (kurang) atau overfinancing (berlebih), karena APBD Kabupaten Sumenep sebagian besar ditopang dari perimbangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep selama periode tahun 2014-2018

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2009:25)

Sedangkan pengukuran kinerja (*Performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan nilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Mahsun, 2009:26).

Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2013:43) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis Kinerja Pendapatan Daerah

Analisis varian anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya anggaran pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh pemerintah daerah (Mahmudi 2007:123).

$$\text{Varian Pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

Pertumbuhan Pendapatan

Menurut Mahmudi (2007:124) Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya meningkat, atau sebaliknya jika terjadi pertumbuhan negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penuru kinerja pendapatan. Pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Thn } t = \frac{\text{Pendapatan Thn } t - \text{Pendapatan Thn } t-1}{\text{Pendapatan Thn } t}$$

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi (2007:129) Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Analisis Kinerja Belanja Daerah

Analisis Varian Belanja

Menurut Mahmudi (2007:143) dalam hal belanja terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila

realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

$$\text{Varians Belanja} = \frac{\text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}}$$

Analisis Keserasian Belanja

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai posisi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (Mahmudi, 2007:150).

Rasio belanja operasi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{RBOTB} = \frac{\text{Rasio Belanja Operasi} \times 100\%}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mahsun (2009:146) Anggaran Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam satu tahun anggaran.

Menurut Nordiawan *dkk* (2009: 39) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian serta harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini merupakan bagian dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD.

Laporan Realisasi Anggaran

LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim, 2014:284).

PENELITIAN TERDAHULU

Arizka (2010: 42) dengan judul kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja realisasi pengelolaan APBD. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja pendapatan pemerintah kota Medan sudah cukup baik. Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama menganalisis kinerja APBD.

Paat (2013) dengan judul Perbandingan Kinerja Pengelolaan APBDE antara Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dan membandingkan kinerja pengelolaan APBD antara Kota Tomohon dan Kota Manado. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Tomohon lebih baik dari Pemerintah Kota Manado dalam mengelola APBD pada tahun anggaran 2010-2011.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:8) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivistik, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang dalam skripsi ini mengambil Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana penulis melakukan penelitian langsung di objek penelitian dengan mengambil data berupa Laporan Realisasi Anggaran dan juga didukung dengan

literatur-literatur yang relevan dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Visi

Mewujudkan sumenep makmur cerdas dan berakhlak

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan
2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.
3. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.

KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang didapat berupa data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep, Senin 15 Juni 2020 peneliti datang ke BPPKAD Kabupaten Sumenep dengan membawa surat ijin penelitian dari BAKESBANGPOL Kabupaten Sumenep. Pertama datang ke ruang sekretariat BPPKAD Kabupaten Sumenep untuk menjelaskan tujuan ingin meminta data laporan realisasi anggaran tahun 2014-2018. Kemudian dari ruang sekretariat kebidang anggaran untuk meminta data yang diperlukan penulis untuk penelitian, dan data yang dibutuhkan yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Tahun Anggaran 2014-2018.

ANALISIS DATA

1. Analisis Kinerja Pendapatan

a. Analisis Varians Pendapatan

Analisis Varians Pendapatan dilakukan dengan cara

menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Hasil dari perhitungan varian pendapatan daerah:

Rumus Varians Pendapatan : $\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$

Tabel 1 Perhitungan Varian Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 2018

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian/Selisih (Rp)	Presentase
2014	1.606.203.648.654,00	1.647.362.227.719,17	41.158.579.065,17	102,56
2015	1.984.156.456.274,00	1.952.700.349.515,34	(31.456.106.758,66)	98,41
2016	2.061.160.965.358,00	2.059.564.134.914,75	(1.596.830.443,25)	99,92
2017	2.128.779.863.857,00	2.160.989.531.868,68	32.209.668.011,68	101,51
2018	2.231.188.899.160,00	2.243.989.568.754,29	12.800.669.594,29	100,57
	Rata-rata		23.844.370.775	100,59

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Berikut hasil dari perhitungan pertumbuhan pendapatan:

Pertumbuhan Pendapatan Thn t = $\frac{\text{Pendapatan Thn t} - \text{Pendapatan Thn t-1}}{\text{Pendapatan Thn t-1}}$

Tabel 2 Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pertumbuhan (%)	Total Pendapatan Daerah (TAD) (Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	143.671.121.947,00	113,02	18.700.743.207,17	102,56
2015	186.692.333.901,00	92,50	(14.005.013.379,66)	98,41
2016	171.118.867.687,00	122,13	37.863.319.273,75	99,92

2017	196.786.697.840,00	96,93	(6.036.632.481,32)	101,51
2018	226.304.702.516,00	82,12	(40.471.946.762,71)	100,57

3. Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 3 Perhitungan Derajat Desentralisasi Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Total Pendapatan Daerah (TPD) (Rp)	Rasio %	Kinerja
2014	1.647.362.227.719,17	162.371.865.154,17	10,14	Kurang baik
2015	1.952.700.349.515,34	172.687.320.521,34	11,31	Kurang baik
2016	2.059.564.134.914,75	208.982.186.960,75	9,85	Tidak baik
2017	2.160.989.531.868,68	190.750.065.358,68	11,32	Kurang baik
2018	2.243.989.568.754,29	185.832.755.753,29	12,07	Kurang baik
	Rata-rata		10,94	Kurang baik

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis Varian, Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014-2018 masuk kategori baik.
2. Berdasarkan hasil analisis Pertumbuhan, Pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2014-2018 mengalami kategori baik.
3. Berdasarkan hasil analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Sumenep termasuk kategori efektif.

4. Berdasarkan hasil analisis Varian Belanja, kinerja Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014-2018 masuk kategori baik.
5. Berdasarkan hasil Analisis Keserasian Belanja dari keseluruhan Belanja Modal terhadap Total Belanja daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2014-2018 kinerja belanja modal dapat dikategorikan kurang baik.
6. Berdasarkan Analisis Efisien Belanja Daerah bahwa keseluruhan rata-rata belanja daerah dapat dikategorikan efisien.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep
 - a. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebaiknya dapat meningkatkan APBD dengan cara menggali sumber-sumber yang menghasilkan pendapatan daerah melalui pajak daerah maupun retribusi daerah, revitalisasi pasar, penyuluhan tentang arti pentingnya retribusi bagi pemerintah, penyuluhan kepada pemungut pajak untuk lebih intensif dalam pemungutan pendapatan daerah.
 - b. Untuk kinerja belanja sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat meningkatkan realisasi belanja pada belanja modal, dan tetap mengefisiensikan belanja pada belanja operasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya:
 - a. Diharapkan untuk dapat meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dan menambah rasio-rasio keuangan lainnya.

b. Dapat menambahkan periode tahun anggaran, agar lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Bitung, P. K., Bisnis, E., & Akuntansi, J. (n.d.). *No Title*. 2(4), 278–288.

Ekonomi, J. K., Daerah, K., Layuk, P. K. A., & Matani, C. D. (2019). *ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG* Penulis : 34 *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* , Volume 4 , Nomor 1 , April 2019 : 33-43. 4(April), 33–43.

Elim, I., Saerang, D., & Liando, H. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value for Money. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 1686–1694.

Fitra, H. (1999). *Analisis Pendapatan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran*. 369–386.

Fitra, H. (2016). *Penggunaan Laporan Keuangan Untuk Melihat Gambaran Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kotamadya di Pulau Sumatera*. 1107–1116.

Gede, L., & Artini, S. (2011). *ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN*. 733–750.

Goldman, A., Reid, J., & Rothman, L. S. (1981). Identification of electric quadrupole O₂ and N₂ lines in the infrared atmospheric absorption spectrum due to the vibration-rotation fundamentals. *Geophysical Research Letters*, 8(1), 77–78.
<https://doi.org/10.1029/GL008i001p00077>

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

Ii, B. A. B., & Teori, L. (2009). *No Title*. 7–20.

Kabupaten, P., & Tenggara, M. (n.d.). *No Title*. 1(3), 82–89.

- Kinerja, A., Dalam, B., Realisasi, L., & Lra, A. (2016). *PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*. 4(1), 1473–1484.
- Kinerja, A., Pada, P., Pengelolah, D., & Asset, K. (n.d.). *Analisis kinerja pendapatan pada dinas pengelolah keuangan asset dan pendapatan kabupaten minahasa selatan*. 4(1), 56–66.
- Liando, G. Y., Elim, I., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2016). *PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*. 4(1), 1473–1484.
- Mahmudi. 2010. Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mondes, M. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. 4(2), 101–118.
- Mustafa, S., & Anugranita, D. A. (2016). Analisis Varians Anggaran Pendapatan dan Biaya (Studi pada Pd. Pasar Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 80–92.
- Nugroho, A. A., Ekonomi, F., & Surakarta, U. M. (2012). *No Title*.
- Online, I., Cetak, I., Asia, S., & Email, M. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto Dengan Pendekatan Value For Money*. 1.
- Palilingan, A. F., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2015). *ISSN 2303-1174 Anastasia F. Palilingan, H. Sabijono, L. Mawikere, Analisis Kinerja Belanja* 3(1), 17–25.
- Pemerintah, konsep tual. (2003). *DHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 1. 1*, 1–40.
- Penelitian, L., & Riau, U. (1907). *Jurnal SOROT Vol 8 No 1 April hal 1 – 104 Lembaga Penelitian Universitas Riau*. 8(1), 95–104.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN HUKUM, SERTA NASIONALISME TERHADAP 22 KEPATUHAN WAJIB PAJAK

DALAM MEMBAYAR PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar).
Jurnal Akuntansi Dan Auditing, 14(1), 22. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18221>

Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu).
Katalogis, 5(3), 190–200.

Putri, M. F. (2018). *ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KAWASAN METROPOLITAN MEBIDANGRO TAHUN ANGGARAN 2011-2014*. 3(2), 317–334.

Realisasi, A., Pendapatan, A., Belanja, D. A. N., & Bitung, P. K. (n.d.). *ISSN 2303-1174 Ardon F. Honga., Ventje Ilat*. 2(4), 278–288.

Sebayang, P. S. (2015). *Antar Propinsi Sumatera*. 1–10.

Setiawan, A. B., & Surtini, E. (n.d.). *54 A.B. Setiawan, E. Surtini Analisis Kontribusi dan Efektifitas Sumber-Sumber Penerimaan*. 54–70.

Sondakh, J. J., Warongan, J. D. L., & Departement, A. (2003). *Analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah serta potensi pendapatan asli daerah pada kabupaten minahasa utara*. 139–151.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta

Sumenep, D. I. K. (2011). *Analisis beberapa faktor yang mempengaruhi belanja daerah di kabupaten sumenep*.

Suyatin, R. F. R. E. A. L. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Permerintah Kota Samarinda. *Ekonomia*, 5(3), 327–345.

Tahun, K. K. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabuapten Klaten Tahun 2008-2012*.
<https://doi.org/10.1109/TNSRE.2009.2039619>

Telaah, J., & Akuntansi, R. (2008). Pengaruh Dau, Dak, Pad, Dan Pdrb Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 124–142.

Telaumbanua, K. (2016). Universitas Dharmawangsa. *Konsep Dasar Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dasar*, 2, 1–16. <https://id.answers.yahoo.com/>

Telaumbanua, K. (2016). Universitas Dharmawangsa. *Konsep Dasar Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dasar*, 2, 1–16. <https://id.answers.yahoo.com/>